



Tahun
2026

RENCANA KERJA

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum.....	4
1.3 Maksud Dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja.....	8
2.2 Analisis kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	18
2.3 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi perangkat Daerah	19
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	22
2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat.....	32
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	33
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	33
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	34
3.3 Program dan Kegiatan.....	36
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	44
BAB V	52

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026 merupakan bagian integral dari siklus perencanaan pembangunan daerah yang bersifat jangka pendek. Dokumen ini disusun setahun sekali untuk menjabarkan arah kebijakan, program, dan kegiatan perangkat daerah se-suai dengan prioritas pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten. Renja menjadi pedoman utama bagi perangkat daerah, termasuk Badan Pendapatan Daerah, dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi secara terarah, terukur, serta mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah.

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) memiliki tanggung jawab strategis dalam pengelolaan pendapatan daerah sebagai sumber pembiayaan pembangunan. Renja ini dirancang untuk memperkuat peran Bapenda dalam mengelola pendapatan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Pengelolaan pendapatan daerah bukan hanya menyangkut pencapaian target fiskal, tetapi juga memastikan keberlanjutan pembangunan daerah dalam jangka pendek melalui penguatan kapasitas fiskal yang sehat dan mandiri.

Secara konseptual, Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan jangka pendek yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program dan kegiatan prioritas yang dijalankan selama lima tahun. Bagi Bapenda, dokumen ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis karena menyangkut upaya menjamin ke-sinambungan pembiayaan pembangunan melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana transfer, dan sumber-sumber pendapatan sah lain-nya. Oleh karena itu, penyusunan Renja

ini menuntut analisis yang tajam, responsif terhadap dinamika, dan berbasis data yang valid.

Penyusunan Renja ini juga merupakan amanat dari berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004* tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan *Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008* tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah. Amanat tersebut diperkuat dengan terbitnya *Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025* tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Instruksi ini menegaskan bahwa seluruh perangkat daerah wajib menyusun Renja yang sinergis dengan dokumen Renstra dan RPJMD dan selaras dengan prioritas pembangunan nasional.

Instruksi Menteri Dalam Negeri tersebut juga mengarahkan agar penyusunan Renja didasarkan pada prinsip partisipatif, akuntabel, terukur, serta berorientasi pada hasil. Artinya, Bapenda tidak hanya dituntut menyusun rencana yang administratif, tetapi juga mampu menunjukkan capaian kinerja nyata dalam upaya meningkatkan penerimaan daerah. Renja harus menjawab tantangan-tantangan aktual seperti digitalisasi layanan perpajakan, perluasan basis pajak dan retribusi, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta kolaborasi dengan instansi vertikal dan pemangku kepentingan lainnya.

Kondisi fiskal daerah yang dinamis dan penuh ketidakpastian juga menjadi salah satu alasan penting disusunnya Renja ini. Ketergantungan pada transfer dari pemerintah pusat, fluktuasi harga komoditas, serta potensi PAD yang belum tergarap optimal menjadi latar belakang perlunya strategi baru yang lebih adaptif dan inovatif. Di sisi lain, implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah turut membawa perubahan mendasar dalam struktur dan mekanisme pengelolaan keuangan daerah, yang harus direspon secara tepat oleh Bapenda.

Di tengah dinamika tersebut, Bapenda Kabupaten Kutai Timur perlu mengambil langkah-langkah teknis melalui penyusunan Renja yang berbasis data dan analisis fiskal yang tajam. Optimalisasi penerimaan daerah harus dilakukan melalui inovasi kebijakan pemungutan, peningkatan kapasitas SDM, digitalisasi layanan, serta kerja sama antar pihak. Dengan arah kebijakan yang tepat, Bapenda dapat mendorong peningkatan pendapatan yang signifikan dan mendukung kemandirian fiskal daerah secara bertahap.

Rencana Kerja (Renja) SKPD tahun 2026 mempunyai fungsi yang penting yaitu sebagai berikut:

1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) SKPD sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
2. Renja SKPD merupakan acuan bagi SKPD untuk memasukan program dan kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan/dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2026; dan
3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan SKPD untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2026.

Akhirnya, Renja ini diharapkan tidak hanya menjadi dokumen perencanaan semata, melainkan sebagai kompas strategis dan panduan teknis bagi Badan Pendapatan Daerah dalam satu tahun ke depan. Dokumen ini akan menjadi alat bantu penting dalam menyusun Rencana kegiatan, merancang anggaran, serta mengukur kinerja melalui indikator yang terukur dan dapat dievaluasi secara periodik. Dengan adanya Renja yang solid dan berorientasi hasil, Badan Pendapatan Daerah dapat mengambil peran aktif dalam mewujudkan tata kelola

pendapatan daerah yang lebih baik, responsif, dan berdampak langsung bagi pembangunan Kabupaten Kutai Timur.

1.2 Dasar Hukum

Penyusunan Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Ti-mur Tahun 2026 mengacu pada berbagai dasar hukum yang menjadi landasan yuridis dan normatif, diantaranya:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan.
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangu-nan Jangka Panjang Nasional 2005–2025.
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Daerah;

10. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
17. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud Rencana Kerja

Badan Pendapatan Daerah Tahun 2026 disusun dengan maksud untuk memberikan landasan teknis dalam rangka pencapaian

Visi, Misi dan Program Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur, sebagai acuan/dasar bagi perencanaan dan pembangunan tahun 2026 dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur, mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi pelaksanaan, perencanaan, dan program/kegiatan serta memberikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2026.

b. Tujuan

Menentukan prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 dalam rangka mengoptimalkan peran dan fungsi perencanaan pengelolaan pajak daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat kabupaten Kutai Timur.

Pedoman kebijakan penyusunan dan pelaksanaan APBD Tahun 2026, agar dapat terlaksana dan bermanfaat dalam rangka meningkatkan Pendapatan daerah khususnya dari sektor pajak daerah.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur tahun 2026 disusun dengan sistematika yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat
Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan
Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja)

Dimaksudkan untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang terjadi dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan. Pelaksanaan rencana Kerja tahun lalu diharapkan dapat menjadi perbandingan untuk rencana kerja tahun berjalan. Evaluasi yang dilaksanakan meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan pencapaian target dan realisasi pendapatan, pelaksanaan program dan kegiatan, hasil rencana program dan kegiatan. Pada Tahun Anggaran 2026, Badan Pendapatan Daerah memberikan kontribusi terhadap pencapaian penyelenggaraan pemerintahan misi kelima meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, dan demokratis, dengan arah kebijakan prioritas pembangunan daerah, yaitu Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memperhatikan aspek efisiensi dan efektivitas pencapaian target dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan, Pengembangan inovasi layanan dari penanganan pengaduan masyarakat. Kontribusi pencapaian kebijakan tersebut ditandai dengan capaian peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pajak daerah sebesar Rp.539.015.543.024,- (122,18%) dari target sebesar Rp 441.156.749.882-, dengan predikat kinerja Sangat Tinggi.

Pendapatan asli daerah yang dikelola Badan Pendapatan Daerah Kab. Kutai Timur terdiri dari:

- A. Pendapatan Pajak Daerah dengan Jumlah Anggaran sebesar Rp. 105.679.635.430,- dan terealisasi sebesar Rp. 115.543.741.226,- (109,33%) terdiri dari 7 (tujuh) mata pajak dan 2 (dua) Opsen sebagai berikut :
 1. Pajak Hotel, realisasi pendapatan pajak hotel pada tahun 2025 sebesar Rp 3.421.960.773,00 dengan target pajak hotel

Rp.4.000.000.000,00 atau 85,54 % turun sekitar 1,73% dibandingkan perolehan pajak tahun 2024

2. Pajak Restoran, realisasi pendapatan pajak restoran pada tahun 2025 sebesar Rp. 63.996.983.767,81 mengalami kenaikan sebesar 13,52% jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan Pajak Restoran pada tahun 2024. Target pajak restoran tahun 2024 sebesar Rp.50.000.000.000,00 dengan realisasi Rp. 63.996.983.767,81 surplus 127,99
3. Pajak Hiburan, target pajak hiburan tahun 2025 sebesar Rp.500.000.000,00 dengan realisasi Rp.621.760.703,00 atau 124,35% realisasi ini meningkat dibanding tahun 2024 sebesar 16,78 %
4. Pajak Reklame, realisasi pendapatan Pajak Reklame pada tahun 2025 sebesar Rp 1.800.337.420,00 mengalami penurunan sebesar 8,60 % jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan Pajak Reklame pada tahun 2024, raihan pajak reklame tahun 2025 sebesar 115,47% dari target yang ditetapkan yaitu Rp.1.559.093.507,00
5. Pajak Penerangan Jalan, target pajak penerangan jalan tahun 2025 Rp.40.000.000.000,00 dengan realisasi Rp.49.642.227.393,25 atau mencapai 124,10% dari target dan 14,38% lebih tinggi dari realisasi tahun 2024.
6. Pajak Parkir, realisasi pendapatan Pajak Parkir pada tahun 2025 sebesar Rp 145.842.846,80,00 dengan target tahun 2025 sebesar Rp. 60.000.000,00 mencapai 243,07% mengalami kenaikan sebesar 216,67% dari tahun sebelumnya.
7. Pajak Air Bawah Tanah, target pajak air bawah tanah 2025 Rp.284.008.106,00 dengan realisasi mencapai Rp.443.629.879,95 atau 156,20% dari target dan turun sebesar 219.53% dari tahun 2024
8. Pajak Sarang Burung Walet, target pajak sarang burung wallet tahun 2025 sebesar Rp.100.000.000,00 dengan realisasi

Rp.71.255.000,00 atau sekitar 71,25 % dari target dan lebih kecil 30,92 % dari tahun sebelumnya

9. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, realisasi pendapatan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan pada tahun 2025 sebesar Rp 40.427.330.444,25 mencapai 168,44% dari target pajak MBLB tahun 2025 yang ditetapkan sebesar Rp. 24.000.000.000,00
 10. Pajak Bumi dan Bangunan Desa/ Kota (PBB P2), target penerimaan pajak bumi dan bangunan untuk tahun 2025 sebesar Rp10.000.000.000,00 dan realisasi penerimaannya untuk tahun 2025 sebesar Rp.18.980.837.166,00 atau sekitar 189,80%,
 11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, realisasi pendapatan BPHTB tahun 2025 Rp.10.511.740.477,00 dengan target tahun 2025 sebesar Rp.43.158.200.000,00 atau tercapai sebesar 24,35%, menurun sebesar 87,20% dibanding tahun sebelumnya.
 12. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), target Opsen Pajak Kendaraan BErmotor tahun 2025 sebesar Rp. 50.799.754.601,00 dengan realisasi Rp.39.282.163.416,00 atau mencapai 77,32 % opsen PKB ini merupakan pajak baru yang dipungut mulai tahun
 13. Opsen Bea Balik Kandaraan Bermotor (BBNKB), target Opsen BBNKB tahun 2025 sebesar Rp.59.420.790.000,00 dengan realisasi Rp. 71.736.969.144,00 tercapai sebesar 120,72% sama halnya dengan Opsen PKB, Opsen BBNKB merupakan pajak yang baru dipungut tahun 2025
- B. Retribusi daerah dengan jumlah anggaran Rp 124.927.854.000,- dan terealisasi sebesar Rp 124.748.149.513,- (99,86%);
- C. Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan dengan jumlah anggaran Rp 7.527.260.223,- dan terealisasi sebesar Rp 7.527.260.223,- (100,00%);

D. Lain-lain PAD yang sah dengan jumlah anggaran Rp 24.819.789.445,- dan terealisasi sebesar Rp 105.657.276.957,- (425,70%);

Badan Pendapatan Daerah mengelola 2 (Dua) Program yaitu program Pengelolaan Pendapatan Daerah dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota

A. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

1. Perencanaan pengelolaan pajak daerah, target tahun 2025 sebesar Rp. 391.356.600,- terrealisasi Rp.319.958.650,- atau 81,76%
2. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah. Target Rp.262.018.000,- realisasinya Rp.212.194.347,-
3. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah, target Rp.1.443.135.000,- realisasinya Rp. 1.264.830.950,- atau 87,64%
4. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah, target 2025 Rp. 2.762.680.840,- terrealisasi Rp.1.949.963.960,- atau 70,58%
5. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, target Rp.601.701.000,- realisasi Rp. 325.863.536,- atau 54,16%
6. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah, target Rp.1.500.295.000,- realisasinya Rp.1.380.317.000,- atau 92%
7. Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), target Rp.555.940.000 realisasinya Rp.555.016.711 atau 99,83%
8. Penetapan Wajib Pajak Daerah, target Rp. 219.679.000,- realisasi Rp. 135.398.303,- atau 61,63%

9. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah target Rp. 435.592.000,- realisasinya Rp. 228.225.995,- atau 52,39%
10. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah, target Rp.362.977.000,- realisasainya Rp.293.248.786,- atau 80,79%
11. Penagihan Pajak Daerah, target Rp.691.697.000,- realisasinya Rp.616.397.831 atau 89,11%
12. Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah, target Rp.335.948.400,- realisasinya Rp.259.568.778,- atau 77,26%
13. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah, target Rp. 513.975.000,- realisasinya Rp. 303.472.801,- atau 59,04%
14. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah, target Rp.365.973.600,- realisasinya Rp. 286.223.458,- atau 78,21%

B. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, pagu anggaran Rp.861.037.004,- realisasi Rp.379.023.633,- atau 47,35%
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, pagu anggaran Rp.41.248.234.373,- realisasi Rp. 34.212.807.589,- atau 82,94%
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat Daerah Pagu Rp. 6.520.000,- realisasi Rp.0
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, pagu anggaran Rp. 294.764.640,- ralisasinya Rp. 208.258.200,- atau 70,65%
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah Pagu anggaran Rp.2.141.903.400,- relisasi Rp. 1.848.017.572,- atau 86,28%

6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Pagu anggaran Rp. 1.690.480.472,- realisasi Rp.1.575.214.798,- tau 93,18%
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, pagu anggaran Rp. 7.607.636.192,- realisasi Rp.6.846.813.583,- atau 90%
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Pagu anggaran Rp. 1.194.738.880,- Realisasi Rp. 1.057.323.70,- atau 88,50%

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja	REALISASI CAPAIAN	SISA ANGGARAN (Rp)	Persentase Capaian Anggaran (%)
(1)	(2)	(3)	2025	2025	(6)	(7)
			(4)	(5)		
			RP	RP	RP	%
5.02.0.00.0.00.03.0000	Badan Pendapatan Daerah		65.488.283.401	54.258.140.181	11.230.143.220	82,85
5.02.0.00.0.00.03.0000			65.488.283.401	54.258.140.181	11.230.143.220	82,85
5.02.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan - BAPENDA	55.045.314.961	46.127.459.075	8.917.855.886	83,80
5.02.001.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	861.037.004	379.023.633	482.013.371	44,02
5.02.001.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	656.562.000	310.873.140	345.688.860	47,35
5.02.001.2.01.002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	-	-	-
5.02.001.2.01.004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-	-	-	-
5.02.001.2.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	55.746.000	54.226.575	1.519.425	97,27
5.02.001.2.01.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	34.045.000	-	34.045.000	0,00
5.02.01.2.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	114.684.004	13.923.918	100.760.086	12,14
5.02.001.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah	41.248.234.373	34.212.807.589	7.035.426.784	82,94
5.02.001.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	39.419.697.373	32.465.252.974	6.954.444.399	82,36
5.02.001.2.02.003	Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya jasa administrasi keuangan	1.701.370.000	1.628.660.217	72.709.783	95,73
5.02.001.2.02.007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan keuangan SKPD	127.167.000	118.894.398	8.272.602	93,49
5.02.001.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jtersedianya kebutuhan Barang Milik Daerah Pada SKPD	6.520.000	-	6.520.000	0,00

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target kinerja	REALISASI CAPAIAN		SISA ANGGARAN (Rp)	Persentase Capaian Anggaran (%)
				2025	2025		
5.02.001.2.03.001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	6.520.000			6.520.000	0,00
5.02.001.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	294.764.640		208.258.200	86.506.440	70,65
5.02.001.2.05.002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	294.400.000		208.258.200	86.141.800	70,74
5.02.001.2.05.009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi	364.640			364.640	0,00
5.02.001.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.141.903.400		1.848.017.572	293.885.828	86,28
5.02.001.2.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	821.372.000		709.785.075	111.586.925	86,41
5.02.001.2.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	660.748.400		561.054.801	99.693.599	84,91
5.02.001.2.06.005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	205.239.000		153.700.000	51.539.000	74,89
5.02.001.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	454.544.000		423.477.696	31.066.304	93,17
5.02.001.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.690.480.472		1.575.214.798	115.265.674	93,18
5.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1.039.323.180		949.796.808	89.526.372	91,39
5.02.001.2.07.010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang tersedia	651.157.292		625.417.990	25.739.302	96,05
5.02.001.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.607.636.192		6.846.813.583	760.822.609	90,00
5.02.001.2.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	579.200.000		497.528.506	81.671.494	85,90
5.02.001.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Layanan umum kantor	7.028.436.192		6.349.285.077	679.151.115	90,34
5.02.001.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.194.738.880		1.057.323.700	137.415.180	88,50
5.02.001.2.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	669.179.000		579.195.700	89.983.300	86,55

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target kinerja	REALISASI CAPAIAN	SISA ANGGARAN (Rp)	Persentase Capaian Anggaran (%)
			2025	2025		
5.02.001.2.09.006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	439.710.000	393.280.000	46.430.000	89,44
5.02.001.2.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	64.200.000	64.200.000	-	100,00
5.02.001.2.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	21.649.880	20.648.000	1.001.880	95,37
5.02.004	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase PAD Terhadap Pendapatan	10.442.968.440	8.130.681.106	2.312.287.334	77,86
5.02.004.2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Terlaksananya pengelolaan pendapatan daerah	10.442.968.440	8.130.681.106	2.312.287.334	77,86
5.02.004.2.01.001	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Laporan perencanaan dan pengelolaan pajak daerah	391.356.600	319.958.650	71.397.950	81,76
5.02.004.2.01.002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah laporan analisa dan pengembangan pajak daerah serta tersusunnya kebijakan pajak daerah	262.018.000	212.194.347	49.823.653	80,98
5.02.004.2.01.003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1.443.135.000	1.264.830.950	178.304.050	87,64
5.02.004.2.01.004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah yang tersedia	2.762.680.840	1.949.963.960	812.716.880	70,58
5.02.004.2.01.005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	601.701.000	325.863.536	275.837.464	54,16
5.02.004.2.01.006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah laporan pengolahan pemeliharaan dan pelaporan basis data pajak daerah	1.500.295.000	1.380.317.000	119.978.000	92,00
5.02.004.2.01.007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Laporan Penilaian SPPT PBB dan BPHTB Sektor Kota dan Pedesaan	555.940.000	555.016.711	923.289	99,83
5.02.004.2.01.008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Wajib Pajak Yang ditetapkan	219.679.000	135.398.303	84.280.697	61,63
5.02.004.2.01.009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah layanan dan konsultasi pajak daerah	435.592.000	228.225.995	207.366.005	52,39
5.02.004.2.01.010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah dilakukan Penelitian dan Verifikasi	362.977.000	293.248.786	69.728.214	80,79
5.02.004.2.01.011	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan penagihan pajak daerah	691.697.000	616.397.831	75.299.169	89,11
5.02.004.2.01.012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian keberatan pajak daerah	335.948.400	259.568.778	76.379.622	77,26

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) // Kegiatan (output)	Target kinerja	REALISASI CAPAIAN	SISA ANGGARAN (Rp)	Persentase Capaian Anggaran (%)
			2025	2025		
5.02.004.2.01.013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	513.975.000	303.472.801	210.502.199	59,04
5.02.004.2.01.014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	365.973.600	286.223.458	79.750.142	78,21
			Rp 65.488.283.401	Rp 54.258.140.181	11.230.143.220	81,00

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2025 dapat dilihat dari realisasi pelaksanaan program dan kegiatan yang didukung oleh penyerapan anggaran. Berdasarkan data realisasi belanja per 31 Desember 2025, total pagu anggaran sebesar Rp65.488.283.401 dengan realisasi sebesar Rp54.258.140.181 atau 82,85%, sehingga masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp11.230.143.220. Tingkat realisasi tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar program dan kegiatan telah dilaksanakan dengan cukup baik, meskipun masih terdapat beberapa kegiatan yang belum terealisasi secara optimal.

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, tingkat realisasi anggaran mencapai 83,80%, yang menunjukkan bahwa kegiatan administrasi perkantoran, pengelolaan keuangan, penyediaan jasa penunjang, serta pemeliharaan sarana dan prasarana telah berjalan dengan cukup efektif dalam mendukung operasional organisasi. Beberapa kegiatan bahkan menunjukkan realisasi yang sangat tinggi, seperti pemeliharaan gedung kantor sebesar 100% dan penilaian PBB-P2 dan BPHTB sebesar 99,83%, yang mencerminkan pelaksanaan kegiatan yang optimal.

Pada Program Pengelolaan Pendapatan Daerah, realisasi anggaran mencapai 77,86%. Beberapa kegiatan yang mendukung optimalisasi pendapatan daerah menunjukkan kinerja yang cukup baik, seperti pengolahan dan pemeliharaan basis data pajak daerah (92,00%), penagihan pajak daerah (89,11%), serta penyuluhan kebijakan pajak daerah (87,64%). Hal ini menunjukkan adanya upaya yang cukup aktif dalam meningkatkan pelayanan perpajakan dan pengelolaan data pajak daerah.

Meskipun demikian, masih terdapat kegiatan dengan realisasi yang relatif rendah, seperti pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah (54,16%), pelayanan dan konsultasi pajak daerah (52,39%), serta pengendalian dan

pengawasan pajak daerah (59,04%). Kondisi tersebut menunjukkan perlunya peningkatan efektivitas pelaksanaan kegiatan yang berkaitan langsung dengan perluasan basis pajak dan peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Secara umum, kinerja pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2025 dapat dikategorikan **cukup baik**, karena sebagian besar program dan kegiatan telah dilaksanakan dengan tingkat realisasi anggaran di atas 80%. Namun demikian, untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan optimalisasi pendapatan daerah, diperlukan peningkatan perencanaan kegiatan, penguatan pengawasan pelaksanaan program, serta optimalisasi kegiatan yang berkaitan langsung dengan pelayanan perpajakan dan pendataan objek pajak.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam era otonomi daerah, Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber penerimaan Daerah khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal di dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk pajak daerah oleh Badan Pendapatan Daerah sebagai lembaga teknis penghasil PAD dalam bidang pajak daerah.

Dalam menjalankan fungsinya tersebut, Badan Pendapatan Daerah dihadapkan pada beberapa permasalahan, yaitu :

1. Masih kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban untuk membayar pajak.
2. Sarana Pelayanan Pajak pada kantor Badan Pendapatan Daerah masih perlu dilakukan pembenahan dengan tempat yang lebih luas dan fasilitas pelayanan publik yang lengkap.

3. Masih kurang optimalnya sistem yang mendorong akuntabilitas dan transparansi pajak, dalam hal ini dikaitkan dengan manajemen sistem informasi pelayanan perpajakan khususnya pelayanan perpajakan yang berbasis Informasi dan Teknologi (IT).
4. Tantangan dalam hal profesionalisme dan integritas SDM Pelayan Pajak (Aparatur) dalam pelayanan perpajakan.
5. Belum adanya kajian potensi penerimaan pajak daerah dengan Analisa Potensi Penerimaan Pajak Daerah dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah, terdapat faktor-faktor penghambat sebagai tantangan dan pendorong sebagai peluang atas pelayanan yang diberikan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Berikut faktor penghambat dan faktor pendorong yang dimiliki oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur

Faktor Penghambat:

1. Belum tersedia SDM yang terlatih, khususnya dalam bidang audit pajak dan audit pajak berbasis Teknologi;
2. Masih kurangnya revisi regulasi yang sesuai dengan peraturan, perundangundangan disesuaikan kondisi yang ada/terkini;
3. Peraturan Daerah dan peraturan kepala daerah tentang Pajak Daerah belum tersosialisasikan kepada seluruh pihak yang berkepentingan, sehingga banyak wajib pajak yang belum memahami hak dan kewajibannya;
4. Pengelolaan piutang pajak belum optimal

5. Anggaran yang dikelola Bidang Pendapatan belum dapat mendongkrak hasil pendapatan asli daerah secara optimal;

Sedangkan faktor pendorong untuk meningkatkan kinerja guna tercapainya tujuan dan sasaran sehingga dapat teratasi segala permasalahan permasalahan yang ada, yaitu:

Faktor Pendorong

1. Badan Pendapatan Daerah Kab. Kutai Timur sebagai pemungut Pajak Daerah serta koordinator penerimaan pendapatan daerah
2. Adanya komitmen yang tinggi dari seluruh pegawai dengan jumlah petugas pelayan pajak yang memadai sehingga tercipta hubungan kerja yang baik, dalam menciptakan suasana kerja yang kondusif sehingga menimbulkan motivasi kerja yang tinggi.
3. Posisi strategis kab. Kutai Timur sebagai daerah penyangga ibu kota Negara (IKN) memberikan pengaruh besar terhadap laju perdagangan, jasa dan industri serta pintu gerbang investasi di berbagai sektor.
4. Disusunnya regulasi peraturan pajak;
5. Mekanisme kerja yang berorientasi kepada pencapaian kinerja dari pada pembangunan sektoral.
6. Adanya dukungan SKPD terhadap upaya peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Salah satu perangkat yang digunakan dalam menganalisa permasalahan adalah analisa SWOT,

Kekuatan (<i>Strength</i>)	Kelemahan (<i>Weakness</i>)
• Digitalisasi perpajakan • Anggaran cukup memadai • Terdapat regulasi perda	• Pendataan belum menyeluruh • Sarana dan parasarana terbatas

• Komitmen pimpinan dan staf	• Kualitas pelayanan belum maksimal
Peluang (<i>opportunity</i>) • Dukungan eksekutif dan legislative • Perkembangan PDRB yang positif • Kemajuan sistem informasi perpajakan • Updating database pajak secara regular dan periodik	Ancaman (<i>Threat</i>) • resistensi Masyarakat terhadap pajak • Kesadaran Masyarakat yang masih minim • Resistensi Wajib pajak untuk dipasang alat rekam pajak

Dari hasil analisis lingkungan yang telah dilakukan, Badan Pendapatan Daerah Kab. Kutai Timur telah dapat merumuskan faktor-faktor keberhasilan pencapaian visi dan misi organisasi. Penentuan faktor-faktor keberhasilan dilakukan melalui 4 (empat) strategi, yaitu :

1. Mengoptimalkan kekuatan untuk memanfaatkan peluang
2. Menggunakan kekuatan untuk mencegah dan mengatasi ancaman.
3. Mengurangi kelemahan untuk memanfaatkan peluang
4. Mengurangi kelemahan untuk mencegah dan mengatasi ancaman.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Maksud dilaksanakan telaahan terhadap rancangan awal RKPD untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra SKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh SKPD, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap SKPD berdasarkan rancangan awal RKPD. Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program /kegiatan, tolok ukur atau target

sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk SKPD yang bersangkutan. Adapun telaah terhadap rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) pada Badan Pendapatan Daerah Kab. Kutai Timur sebagai berikut:

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						
Perangkat Daerah / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	pagu indikator			lokasi kerja	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	pagu indikator		lokasi kerja	keterangan
				MURNI 2026					MURNI 2026		
		Fisik	(4)	Keuangan				(5)			
(2)	(3)			RP	(2)	(3)	Fisik	Keuangan	(4)	(5)	
		100	%	46.891.933.619						Badan Penerimaan Daerah	
		100	%	38.298.487.611						Badan Penerimaan Daerah	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan - BAPENDA	100	%	38.298.487.611	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan - BAPENDA	100	%	38.298.487.611	Badan Penerimaan Daerah	Sekretariat
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12	Bulan	200.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12	Bulan	200.000.000	Badan Penerimaan Daerah	Sekretariat
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	4	Dokumen	25.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	4	Dokumen	25.000.000	Badan Penerimaan Daerah	Sekretariat
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	1	Laporan	85.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	1	Laporan	85.000.000	Badan Penerimaan Daerah	Sekretariat

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
Perangkat Daerah / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	pagu indikatif		lokasi kerja	Perangkat Daerah / Program / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	pagu indikatif		lokasi kerja	keterangan
		MURNI 2026					MURNI 2026			
		(4)					(4)			
		Fisik	Keuangan				Fisik	Keuangan		
(2)	(3)	4	Lapora n	30.000.000	(2)	(3)	4	Lapora n	30.000.000	(5)
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	4	Lapora n	30.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	4	Lapora n	30.000.000	Badan Pemp dapan Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	1	Dokum en	60.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	1	Dokum en	60.000.000	Badan Pemp dapan Daerah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertaksananya Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah	12	Bulan	30.293.039.931	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertaksananya a Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah	12	Bulan	30.293.039.931	Badan Pemp dapan Daerah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	180	Orang / Bulan	28.523.839.931	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	180	Orang / Bulan	28.523.839.931	Badan Pemp dapan Daerah
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya jasa administrasi keuangan	12	Dokum en	1.569.200.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya jasa administrasi keuangan	12	Dokum en	1.569.200.000	Badan Pemp dapan Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD	24	Lapora n	100.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD	24	Lapora n	100.000.000	Badan Pemp dapan Daerah

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						
Perangkat Daerah / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	pagu indikatif		lokasi kerja	Perangkat Daerah / Program / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	pagu indikatif		lokasi kerja	keterangan	
		MURNI 2026					MURNI 2026				
		Fisik	(4)				Fisik	(4)			
(2)	(3)			(5)	(2)	(3)			(5)		
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60	unit	95.400.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60	unit	95.400.000	Badan Pendapatan Daerah	Sekretariat
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase PAD Terhadap Total Pendapatan	100	%	8.593.446.008	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase PAD Terhadap Total Pendapatan	100	%	8.593.446.008	Kabupaten Kutai Timur	
Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Optimalnya pengelolaan pendapatan daerah	100	%	8.593.446.008	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Optimalnya pengelolaan pendapatan daerah	100	%	8.593.446.008	Kabupaten Kutai Timur	-
Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Laporan perencanaan dan pengelolaan pajak daerah	6	Laporan	225.000.000	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Laporan perencanaan dan pengelolaan pajak daerah	6	Laporan	225.000.000	Kabupaten Kutai Timur	Bidang PEP
Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah laporan analisa dan pengembangan pajak daerah serta tersusunnya kebijakan pajak daerah	18	Laporan	225.000.000	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah laporan analisa dan pengembangan pajak daerah serta tersusunnya kebijakan pajak daerah	18	Laporan	225.000.000	Kabupaten Kutai Timur	Bidang PEP
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	18	Laporan	1.125.000.000	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	18	Laporan	1.125.000.000	Kabupaten Kutai Timur	Bidang PEP

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						
Perangkat Daerah / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	pagu indikator		lokasi kerja	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	pagu indikator		lokasi kerja	keterangan	
			MURNI 2025					MURNI 2026			
		(4)					(4)				
(2)	(3)	Fisik	Keuangan	(5)	(2)	(3)	Fisik	Keuangan	(5)		
Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah layanan dan konsultasi pajak daerah	2	Layanan	168.182.598	Kabupate n Kutai Timur	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah layanan dan konsultasi pajak daerah	Layana n	168.182.598	Kabupat en Kutai Timur	Bidang Pendataa n dan penetapa n
Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah dilakukan Penelitian dan Verifikasi	12	Dokum en	225.000.000	Kabupate n Kutai Timur	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Dokum en	225.000.000	Kabupat en Kutai Timur	Bidang PBB dan BPHTB
Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan penagihan pajak daerah	36	Dokum en	225.000.000	Kabupate n Kutai Timur	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan penagihan pajak daerah	Dokum en	225.000.000	Kabupat en Kutai Timur	Bidang Penagiha n
Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian keberatan pajak daerah	12	Dokum en	225.000.000	Kabupate n Kutai Timur	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian keberatan pajak daerah	Dokum en	225.000.000	Kabupat en Kutai Timur	Bidang Penagiha n
Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	36	Dokum en	225.000.000	Kabupate n Kutai Timur	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Doume n	225.000.000	Kabupat en Kutai Timur	Bidang Pendataa n dan penetapa n
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	24	Lapora n	225.000.000	Kabupate n Kutai Timur	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Lapora n	225.000.000	Kabupat en Kutai Timur	Bidang Penagiha n

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
Perangkat Daerah / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	pagu indikatif		lokasi kerja	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	pagu indikatif		lokasi kerja	keterangan
		MURNI 2026					MURNI 2026			
		(4)	(5)				(4)	(5)		
(2)	(3)	Fisik	Keuangan	RP	(2)	(3)	Fisik	Keuangan	RP	
						Retribusi Daerah				
		Total Keseluruhan :		46.891.933.619,00			Total Keseluruhan :		46.891.933.619,00	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Badan Pendapatan Daerah secara langsung tidak melaksanakan telaah atau kajian atas usulan program dan kegiatan dari kelompok masyarakat/ perorangan, badan/lembaga/organisasi swasta dan perusahaan daerah disebabkan tidak terdapatnya usulan program dan kegiatan masyarakat yang masuk melalui musrenbang mengingat tupoksi Badan Pendapatan Daerah adalah melakukan pengelolaan dan pelayanan pajak daerah melalui perencanaan, pengembangan, pengelolaan, pelayanan, penetapan, penagihan, dan pengawasan serta pengendalian sumber-sumber pendapatan daerah untuk memenuhi pelaksanaan pembangunan daerah yang salah satunya diakomodir dengan mekanisme musrenbang dengan memenuhi usulan program dan kegiatan masyarakat diberbagai bidang/sektor, sehingga tabel rekapitulasi usulan program dan kegiatan masyarakat adalah nihil.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 mengusung tema **“Kedaulatan Pangan dan Energi serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif”** dengan fokus pada tiga prioritas utama yaitu peningkatan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, penurunan kemiskinan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pemerintah juga menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi di kawasan timur Indonesia untuk mendorong pemerataan pembangunan antarwilayah.

Di sisi fiskal, pemerintah merancang kebijakan yang tetap ekspansif namun terarah guna menjaga stabilitas ekonomi nasional serta mengantisipasi dampak perlambatan ekonomi global. Kebijakan ini dilakukan melalui optimalisasi penerimaan negara, peningkatan efisiensi belanja, serta penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pada tahun 2026 pemerintah juga tidak merencanakan pengenaan jenis pajak baru, namun lebih menekankan pada optimalisasi penerimaan melalui reformasi administrasi perpajakan dan peningkatan kepatuhan pajak.

Kebijakan nasional tersebut memberikan implikasi terhadap pengelolaan keuangan daerah, khususnya dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah daerah didorong untuk meningkatkan kemandirian fiskal melalui optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah, terutama pajak daerah dan retribusi daerah. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas pelayanan pajak, pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem perpajakan daerah, serta penguatan pengawasan dan penagihan pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Bagi Kabupaten Kutai Timur, kebijakan nasional tersebut memberikan peluang yang cukup besar dalam meningkatkan penerimaan daerah. Sebagai daerah yang memiliki potensi sumber daya alam yang besar, khususnya di sektor pertambangan, perkebunan, dan perdagangan, pertumbuhan aktivitas ekonomi daerah berpotensi meningkatkan basis pajak daerah seperti Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Selain itu, perkembangan investasi dan pembangunan infrastruktur juga berpotensi meningkatkan aktivitas ekonomi yang berdampak pada peningkatan PAD.

Dengan demikian, arah kebijakan nasional tahun 2026 memberikan peluang bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur untuk meningkatkan kinerja pengelolaan pendapatan daerah melalui optimalisasi potensi pajak daerah, peningkatan kualitas pelayanan perpajakan, serta penguatan sistem pengelolaan pendapatan berbasis digital guna mendukung peningkatan kemandirian fiskal daerah dan keberlanjutan pembangunan daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran/implementasi dari pernyataan Misi dengan didasarkan pada isu-isu dan analisis strategi dan juga merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu 1 tahunan. Tujuan ini tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang.

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Program Pendukung
Terwujudnya peningkatan pendapatan daerah Kabupaten Kutai Timur	Tingkat pencapaian target pendapatan daerah	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kutai Timur yang optimal	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	-	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Program Pendukung
			Persentase PAD terhadap total pendapatan daerah	7,25%	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Dalam rangka pencapaian sasaran tersebut diatas, maka diperlukan strategi dan kebijakan yang akan ditempuh oleh Badan Pendapatan Daerah Kab. Kutai Timur. Strategi merupakan langkah-langkah yang ditempuh secara incremental (senantiasa meningkat) dan terus menerus yang didasari oleh pemikiran konseptual, analisis, dan komprehensif untuk memperkuat dan memperlancar pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Adapun strategi yang akan ditempuh dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran diatas adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan pemenuhan kewajiban pajak/retribusi bagi masyarakat dan berkurangnya tunggakan pajak daerah;
2. Peningkatan tertib administrasi pemungutan, pengendalian, sistem pengawasan internal, dan pemeriksaan pendapatan daerah;
3. Penggalan sumber-sumber potensi pendapatan baru;
4. Peningkatan akurasi data potensi penerimaan daerah;
5. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak ;
6. Percepatan regulasi dasar pemungutan pajak/retribusi daerah;
7. Peningkatan kapabilitas dan profesionalisme SDM dalam pelayanan publik;

8. Peningkatan dan pemenuhan standar minimal sarana dan prasarana penunjang pelayanan berbasis IT;

Sedangkan Kebijakan yang ditempuh dalam rangka mewujudkan strategi tersebut:

1. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemungutan dan penagihan pendapatan daerah;
2. Pemetaan potensi pendapatan daerah;
3. Penyebarluasan informasi dan program sosialisasi di bidang pendapatan daerah dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat;
4. Jemput bola dan mendekatkan lokasi pelayanan kepada wajib pajak
5. Pemberian sanksi bagi wajib pajak yang melanggar/menunggak;
6. Perluasan wajib pajak melalui pengumpulan data dan penetapan wajib pajak;
7. Perluasan obyek pajak melalui pendataan berkelanjutan;
8. Penyelesaian kasus pajak sesuai ketentuan perpajakan;
9. Menyesuaikan tarif Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
10. Menyusun dan menerapkan Standar Operasional Prosedure Pelayanan Pajak Daerah;
11. Melakukan pembinaan peningkatan kompetensi SDM dalam pelayanan publik;

3.3 Program dan Kegiatan

Program merupakan bentuk instrumen kebijakan yang dilaksanakan oleh SKPD sebagai bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan yang menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan sasaran strategi SKPD. Sedangkan kegiatan adalah bagian program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang

berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa. Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dalam pembangunan daerah. Perumusan program dan kegiatan pada tahap ini, merupakan penyesuaian antara identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan hasil analisis dengan arahan prioritas program dan kegiatan SKPD menurut Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), serta mempertimbangkan hasil telaahan kebijakan nasional, dan kebijakan provinsi bagi kabupaten/kota. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur tahun 2026.

PROGRAM DAN KEGIATAN 2026						
Perangkat Daerah / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target	Pagu Indikatif	Lokasi Kerja	Sumber Dana	
(2)	(3)	(4)		(5)	(G)	
		Fisik	Keuangan	RP		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan - BAPENDA	100	%	46.891.933.619	Badan Pendapatan Daerah	APBD Kabupaten Kutai Timur
		100	%	38.298.487.611	Badan Pendapatan Daerah	APBD Kabupaten Kutai Timur
	12	Bulan	200.000.000	Badan Pendapatan Daerah	APBD Kabupaten Kutai Timur	
	4	Dokumen	25.000.000	Badan Pendapatan Daerah	APBD Kabupaten Kutai Timur	
	1	Laporan	85.000.000	Badan Pendapatan Daerah	APBD Kabupaten Kutai Timur	
	4	Laporan	30.000.000	Badan Pendapatan Daerah	APBD Kabupaten Kutai Timur	
	1	Dokumen	60.000.000	Badan Pendapatan Daerah	APBD Kabupaten Kutai Timur	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah					
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd					
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah					
Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun					

PROGRAM DAN KEGIATAN 2026						
Perangkat Daerah / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target		Pagu Indikatif	Lokasi Kerja	Sumber Dana
(2)	(3)	(4)		MURNI 2026	(5)	(G)
		Fisik		Keuangan	RP	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah	12	Bulan	30.293.039.931	Badan Pendapatan Daerah	APBD Kabupaten Kutai Timur
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	180	Orang / Bulan	28.523.839.931	Badan Pendapatan Daerah	APBD Kabupaten Kutai Timur
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya jasa administrasi keuangan	12	Dokumen	1.569.200.000	Badan Pendapatan Daerah	APBD Kabupaten Kutai Timur
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD	24	Laporan	100.000.000	Badan Pendapatan Daerah	APBD Kabupaten Kutai Timur
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan keuangan SKPD	24	Laporan	100.000.000	Badan Pendapatan Daerah	APBD Kabupaten Kutai Timur
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%	646.657.810	Badan Pendapatan Daerah	APBD Kabupaten Kutai Timur
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	10	Paket	212.828.580	Badan Pendapatan Daerah	APBD Kabupaten Kutai Timur
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	10	Paket	215.934.710	Badan Pendapatan Daerah	APBD Kabupaten Kutai Timur

PROGRAM DAN KEGIATAN 2026					
Perangkat Daerah / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target	Pagu Indikatif	Lokasi Kerja	Sumber Dana
(2)	(3)	(4)		(5)	(G)
		Fisik	Keuangan	RP	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	95.038.000	Badan Pendapatan Daerah	APBD Kabupaten Kutai Timur
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tersedianya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	2 Dokumen	122.856.520	Badan Pendapatan Daerah	APBD Kabupaten Kutai Timur
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	<u>6.994.779.870</u>	Badan Pendapatan Daerah	APBD Kabupaten Kutai Timur
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	36 Laporan	746.260.000	Badan Pendapatan Daerah	APBD Kabupaten Kutai Timur
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Layanan umum Kantor	12 Laporan	6.248.519.870	Badan Pendapatan Daerah	APBD Kabupaten Kutai Timur
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	<u>164.010.000</u>	Badan Pendapatan Daerah	APBD Kabupaten Kutai Timur

PROGRAM DAN KEGIATAN 2026						
Perangkat Daerah / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target		Pagu Indikatif	Lokasi Kerja	Sumber Dana
(2)	(3)	(4)		MURNI 2026	(5)	(G)
		Fisik				
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	42	unit	68.610.000	Badan Pendapatan Daerah	APBD Kabupaten Kutai Timur
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60	unit	95.400.000	Badan Pendapatan Daerah	APBD Kabupaten Kutai Timur
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase PAD Terhadap Total Pendapatan	100	%	8.593.446.008	Kabupaten Kutai Timur	APBD Kabupaten Kutai Timur
Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Optimalnya pengelolaan pendapatan daerah	100	%	8.593.446.008	Kabupaten Kutai Timur	APBD Kabupaten Kutai Timur
Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Laporan perencanaan dan pengelolaan pajak daerah	6	Laporan	225.000.000	Kabupaten Kutai Timur	APBD Kabupaten Kutai Timur
Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah laporan analisa dan pengembangan pajak daerah serta tersusunnya kebijakan pajak daerah	18	Laporan	225.000.000	Kabupaten Kutai Timur	APBD Kabupaten Kutai Timur

PROGRAM DAN KEGIATAN 2026							
Perangkat Daerah / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target		Pagu Indikatif	Lokasi Kerja	Sumber Dana	
(2)	(3)	(4)		MURNI 2026	(5)	(G)	
		Fisik		Keuangan	RP		
		18	Laporan	1.125.000.000	Kabupaten Kutai Timur	APBD Kabupaten Kutai Timur	
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	11	Unit	3.320.263.410	Kabupaten Kutai Timur	APBD Kabupaten Kutai Timur	
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah yang tersedia	4	Laporan	225.000.000	Kabupaten Kutai Timur	APBD Kabupaten Kutai Timur	
Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	12	Laporan	1.730.000.000	Kabupaten Kutai Timur	APBD Kabupaten Kutai Timur	
Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah laporan pengolahan pemeliharaan dan pelaporan basis data pajak daerah	1.000	SPPT	225.000.000	Kabupaten Kutai Timur	APBD Kabupaten Kutai Timur	
Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Laporan Penilaian SPPT PBB dan BPHTB Sektor Kota dan Pedesaan	4	Dokumen	225.000.000	Kabupaten Kutai Timur	APBD Kabupaten Kutai Timur	
Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Wajib Pajak Yang ditetapkan	2	Layanan	168.182.598	Kabupaten Kutai Timur	APBD Kabupaten Kutai Timur	
Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah layanan dan konsultasi pajak daerah						

PROGRAM DAN KEGIATAN 2026						
Perangkat Daerah / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target	Pagu Indikatif	Lokasi Kerja	Sumber Dana	
(2)	(3)	(4)		(5)	(G)	
		Fisik	Keuangan	RP		
Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah dilakukan Penelitian dan Verifikasi	12	Dokumen	225.000.000	Kabupaten Kutai Timur	APBD Kabupaten Kutai Timur
Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan penagihan pajak daerah	36	Dokumen	225.000.000	Kabupaten Kutai Timur	APBD Kabupaten Kutai Timur
Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian keberatan pajak daerah	12	Dokumen	225.000.000	Kabupaten Kutai Timur	APBD Kabupaten Kutai Timur
Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	36	Dokumen	225.000.000	Kabupaten Kutai Timur	APBD Kabupaten Kutai Timur
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	24	Laporan	225.000.000	Kabupaten Kutai Timur	APBD Kabupaten Kutai Timur
Total Keseluruhan :			46.891.933.619,00			

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perumusan program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa didasarkan pada pencapaian visi dan misi Kepala Daerah yaitu “Transformasi Ekonomi Melalui Pertumbuhan Ekonomi dan Industri Berbasis Pertanian Perkebunan, Kehutanan, Pariwisata, Peternakan, Perikanan dan Kelautan” melalui peningkatan Pendapatan daerah. Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2026 terdiri dari 2 (dua) Program dan 6 (enam) Kegiatan dan 30 (tigapuluh) Sub Kegiatan, yaitu:

1 Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah terdiri dari sub kegiatan :

1. Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah, dengan indikator kinerja jumlah laporan perencanaan pengelolaan pajak daerah.
2. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah, dengan indikator kinerja jumlah laporan analisa dan pengembangan pajak daerah.
3. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah, dengan indikator kinerja jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan pajak daerah.
4. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, dengan indikator kinerja jumlah laporan hasil pendataan objek pajak daerah.
5. Penetapan Wajib Pajak Daerah, dengan indikator kinerja jumlah dokumen wajib pajak yang ditetapkan.
6. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah, dengan indikator kinerja jumlah layanan dan konsultasi pajak daerah.
7. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah, dengan indikator kinerja jumlah data pelaporan pajak yang diverifikasi.

8. Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah, dengan indikator kinerja jumlah laporan pengelolaan basis data pajak.
9. Penilaian PBB-P2 dan BPHTB, dengan indikator kinerja jumlah laporan penilaian SPPT PBB dan BPHTB.
10. Penagihan Pajak Daerah, dengan indikator kinerja jumlah dokumen hasil penagihan pajak daerah.
11. Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah, dengan indikator kinerja jumlah dokumen penyelesaian keberatan pajak.
12. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah, dengan indikator kinerja jumlah dokumen hasil pengawasan pajak daerah.
13. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, dengan indikator kinerja jumlah laporan pembinaan pengelolaan pajak.
14. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah, dengan indikator kinerja jumlah sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah.

2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota,
dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan indikator kinerja terlaksananya perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan indikator kinerja terlaksananya pengelolaan keuangan perangkat daerah.
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan indikator kinerja terlaksananya administrasi umum perangkat daerah.
4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan indikator kinerja tersedianya jasa penunjang operasional kantor.
5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan indikator kinerja terpeliharanya sarana dan prasarana perangkat daerah.

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE REINSTR OPD	REALISASI CAPAIAN RENUA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB DAERAH
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	30.293.039.931,00	-	-	-	1. Memban gun Sektor Pendidikan 1. Peningka tan infrastruk tur dan konektivitas	-	-	17.805.277.617,51	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	12 Orang/bulan	28.523.839.931,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Memban gun Sektor Pendidikan 1. Peningka tan infrastruk tur dan konektivitas	-	-	16.770.695.796.50	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	-	-	12 Dokumen	1.589.200.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Memban gun Sektor Pendidikan 1. Peningka tan infrastruk tur dan konektivitas	-	-	916.897.914,09	BADAN PENDAPATAN DAERAH
			-	-	-	-	-	38.029.023.061,00	-	-	-	-	-	-	23.437.793.735,35	-
	5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-	-	2 Laporan	100.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	-	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		[TERLAKSANANYA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH BADAN PENDAPATAN DAERAH]	Indeks Professionalisme ASN Nilai SAKIP	76,50 82	67,65 76	67,65 77	70,50 76	38.029.023.061,00	-	-	-	-	-	-	23.437.793.735,35	-
	5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	-	-	-	24 Laporan	100.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan infrastruk tur dan konektivitas	-	-	117.683.906,92	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	573.573.260,00	-	-	-	1. Memban gun Sektor Pendidikan 1. Peningka tan infrastruk tur dan konektivitas	-	-	1.206.604.130,09	BADAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RESTRAS OPD	REALISASI CAPAIAN RENTJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENTJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.02.01.2.06.0002																
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	212.828.580,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Memban gun Sektor Pendidikan 1. Peningka tan infrastruktur dan konektivitas	-		502.572.890,37	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	215.934.710,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Memban gun Sektor Pendidikan 1. Peningka tan infrastruktur dan konektivitas	-		469.430.254,23	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
		5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	95.038.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Memban gun Sektor Pendidikan 1. Peningka tan infrastruktur dan konektivitas	-		234.600.985,48	BADAN PENDAPATAN DAERAH
								38.029.023.061,00							23.437.793.735,35	
		5.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Ansp Dinamis pada SKPD													
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Ansp Dinamis pada SKPD				2 Dokumen	49.771.970,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		-		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		[TERLAKSANANYA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH / BADAN PENDAPATAN DAERAH]	Indeks Professionalisme ASN Nilai SAKIP	76,50 82	67,65 76	67,65 77	70,50 76	38.029.023.061,00							23.437.793.735,35	
		5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					6.798.399.870,00							3.432.447.509,73	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				12 Laporan	548.880.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Memban gun Sektor Pendidikan 1. Peningka tan infrastruktur dan konektivitas	-		319.252.902,68	BADAN PENDAPATAN DAERAH
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RESTRADA OPD	REALISASI CAPAIAN RENAJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU BENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	6.248.518.870,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Memban gun Sektor Pendidikan		3.113.194.607,05	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					-	184.010.000,00			-	1. Peningka tan infrastrukur dan dan konktivitas		588.143.683,50	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				11 Unit	68.610.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan infrastrukur dan dan konktivitas		353.025.359,55	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				150 Unit	95.400.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan infrastrukur dan dan konktivitas		235.118.323,95	BADAN PENDAPATAN DAERAH
2.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase PAD terhadap pendapatan PAD terhadap pendapatan PAD terhadap pendapatan				7,23 7,23 % 7,23 Persen	6.362.910.558,00						5.807.123.826,00	
	[MENINGKATKAN UPAYA EKSTENSIFIKASI DAN INTENSIFIKASI PENDAPATAN]	Persentase capaian pajak daerah terhadap target yg ditetapkan	100	100	100	100	100	6.362.910.558,00						5.807.123.826,00	
		Persentase realisasi penghasilan terhadap piutang pajak	33.2	29.2	30.1	30.8	30.8								
		Persentase Realisasi penerimaan PBB dan BPHTB berdasarkan kelapaan	68.4	60.2	63.5	62.70	62.70								
		Persentase WP terdaftar aktif terhadap total WP terdaftar	79	64.6	65	67	67								
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Jenis Pajak Pendapatan Daerah Jumlah Pendapatan Asli Daerah				11 Pajak Pendapatan 2563202361 26 Rupiah	6.362.910.558,00				1. Memban gun Sektor Pendidikan		5.807.123.826,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengeluaran Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengeluaran Pajak Daerah				4 Dokumen	225.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Memban gun Sektor Pendidikan		452.837.977,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE REINSTR OPD	REALISASI CAPAIAN REINSTR TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENCANA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL		DAERAH	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah																
	5.02.04.2.01.0002		Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah				18 Dokumen	225.000.000.00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Memban gun Sektor Pendidikan 1. Peningka tan infrastruktur dan konektivitas			211.829.620.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0003		Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				18 Laporan	1.125.000.000.00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Memban gun Sektor Pendidikan 1. Peningka tan infrastruktur dan konektivitas			1.044.999.201.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0004		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				18 Unit	1.794.727.960.00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Memban gun Sektor Pendidikan 1. Peningka tan infrastruktur dan konektivitas			406.491.983.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0005		Pendataan dan Pendataraan Objek Pajak Daerah				4 Laporan	225.000.000.00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Memban gun Sektor Pendidikan 1. Peningka tan infrastruktur dan konektivitas			470.299.961.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0006		Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				12 Laporan	1.025.000.000.00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Memban gun Sektor Pendidikan 1. Peningka tan infrastruktur dan konektivitas			561.432.261.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0007		Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)				12 Obyek Pajak	225.000.000.00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Memban gun Sektor Pendidikan 1. Peningka tan infrastruktur dan konektivitas			470.523.797.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENTJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENTJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDAMPAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL		DAERAH	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Keterangan Pajak Daerah				2 Dokumen	225.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan infrastruktur dan konktivitas	-		235.343.806,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah														
			Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah				4 Layanan	188.182.598,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Memban gun Sektor Pendidikan tan infrastruktur dan konktivitas	-		350.513.514,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah														
			Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi				12 Dokumen	225.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Memban gun Sektor Pendidikan tan infrastruktur dan konktivitas	-		329.200.959,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah														
			0				24 0	225.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Memban gun Sektor Pendidikan tan infrastruktur dan konktivitas	-		325.036.078,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah														
			0				12 0	225.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Memban gun Sektor Pendidikan	-		329.490.838,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				2 Dokumen	225.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan infrastruktur dan konktivitas	-		241.946.344,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				12 Laporan	225.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Memban gun Sektor Pendidikan	-		376.577.487,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
			J U M L A H													29.244.317.561,35

BAB V

PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026 merupakan bagian dari proses perencanaan pembangunan daerah yang disusun secara sistematis dan terarah berdasarkan dokumen perencanaan yang lebih tinggi, yaitu RPJMD Kabupaten Kutai Timur serta Renstra Bapenda Tahun 2025–2029. Renja ini memuat rencana program, kegiatan, indikator kinerja, serta target yang akan dilaksanakan oleh Bapenda dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah, khususnya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Renja Bapenda ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan pendapatan daerah secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Selain itu, dokumen ini juga menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) perangkat daerah serta sebagai acuan dalam pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja Badan Pendapatan Daerah selama tahun anggaran berjalan.

Akhirnya, keberhasilan pelaksanaan Renja Bapenda sangat bergantung pada dukungan dan sinergi berbagai pihak, baik pemerintah daerah, instansi terkait, maupun masyarakat sebagai wajib pajak. Oleh karena itu, diharapkan seluruh program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan secara optimal sehingga mampu meningkatkan kinerja pengelolaan pendapatan daerah dan memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kutai Timur.